

**STUDI JARINGAN KERJASAMA
BANK PERKREDITAN RAKYAT
DAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM /
UNIT SIMPAN PINJAM**

OLEH :

Daniel Asnur, S.Kom

**JARINGAN USAHA KOPERASI (JUK)
DEWAN KOPERASI INDONESIA (DEKOPIN)**

1999

Kata Pengantar

Studi “ **JARINGAN KERJASAMA BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM**” ini dilaksanakan di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Barat, Hasil studi ini diharapkan, menjadi masukan bagi Pembina koperasi serta sebagai bahan informasi untuk koperasi dalam meningkatkan usahanya khususnya kegiatan simpan pinjam.

Semoga tulisan ini dapat berguna bagi gerakan koperasi maupun Pembina koperasi sekian terimakasih

Jakarta, Maret 1999

**Direktur Jaringan Usaha Koperasi
Dewan Koperasi Indonesia**

(Drs. Samsul Munir.MBA)

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Tujuan 3
1.3.	Ruang Lingkup 3
1.4.	Metodelogi 3
BAB II	KERANGKA PEMIKIRAN POLA PENGEMBANGAN JARINGAN BPR
BAB III	DISKRIPSI WILAYAH STUDI
3.1.	Jawa Barat 10
3.2.	Jawa Tengah 16
3.3.	Jawa Timur 27
3.4.	Sumatera Barat 34
BAB IV	IDENTIFIKASI DAN ANALISA SISTEM JARINGAN KERJASAMA
4.1.	Aspek Kelembagaan 39
4.2.	Kerjasama BPR dan Koperasi Simpan Pinjam 41
4.3.	Kerjasama Antar BPR 43
4.4.	Kerjasama Antar KSP 44
BAB V	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1	Kesimpulan 47
5.2	Rekomendasi 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan Koperasi Selama ini terlihat mengalami hambatan yang disebabkan beberapa hal antara lain faktor kualitas SDM, permodalan dan kelembagaan pemasaran. Oleh karena itu Jaringan Usaha Koperasi (JUK) DEKOPIN berupaya mengembangkan koperasi dengan memberi bantuan fasilitas yang bertujuan mengurangi hambatan-hambatan tersebut diatas.

Permodalan sebagai salah satu faktor penghambat perkembangan koperasi dapat diatasi dengan memberikan kredit modal mudah dan murah.

Pada masyarakat, pedesaan sudah dikenal beberapa lembaga pendanaan seperti LDKP, BPKD, dan terakhir BPR. BPR merupakan lembaga keuangan "retail" yang benar-benar dikelola menurut peraturan perbankan. Selain itu terdapat KUD yang mempunyai unit simpan pinjam.

Pemikiran untuk menyatukan lembaga-lembaga keuangan tersebut dalam satu jaringan pendanaan sangatlah dibutuhkan, mengingat dengan cara demikian dapat meningkat kemampuan pelayanannya. Sistem pendanaan sindikasi maupun interlending (saling pinjam) diharapkan dapat memberikan suatu solusi sebagai system pendanaan yang efektif dan efisien.

Walaupun lembaga kredit pedesaan telah terlebih dahulu hadir dalam sejarah perekonomian nasional, tetapi perkembangan yang tidak didukung oleh perangkat organisasi, sistem kelembagaan dan ilmu pengetahuan mutakhir telah menyebabkan lembaga keuangan tradisional ini tidak berkembang sejalan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi rakyat. Dilain pihak ekonomi nasional maju pesat telah menciptakan lembaga keuangan modern yang telah menguasai pasar uang dan modal saat ini. Kemajuan dunia perbankan modern yang telah menjangkau kecamatan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang secara historis memang berasal dan berakar dari pedesaan, menurut sementara pengamat dapat pula menjadi penghambat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada umumnya dating dari Bank Umum yang memiliki cabangnya dikecamatan, disamping lembaga Dana dan Kredit Pedesaan yang didirikan oleh Pemda, Bank Desa lainnya, termasuk koperasi simpan pinjam yang mengelola dana masyarakat.

Pandangan tersebut ternyata tidak terlalu kuat, terutama jika ditinjau dari pola penangan ekonomi nasional yang sedang berkembang saat ini. Bank-bank diatas menurut deregulasi perbankan yang diperkenankan oleh Undang-undang No 7/1992, telah dikategorikan ke dalam kelas Bank umum, yang karakteristik bentuk organisasinya tidak lagi akan mampu melayani kebutuhan pengembangan sector ekonomi rakyat yang menganut pola yang berbeda-beda dari sektor ekonomi maju. Seluruh organisasi yang telah ada dalam menunjang kegiatan mereka itu tidak mampu melayani kebutuhan pendanaan seluruh ekonomi rakyat yang semakin berkembang pula. Disamping itu agregasi yang timbul dari kebutuhan tambahan kegiatan masyarakat yang juga didorong dan semakin dikembangkan pemerintah, membutuhkan tambahan modal sektor perbankan yang telah semakin sukar mereka peroleh dari sumber pendanaan melalui mekanisme pasar modal. Oleh sebab itu penggalan dana dari kelompok masyarakat yang tidak mampu memasuki pasar modal seperti pemilik tabungan kecil dan lain sebagainya perlu ditingkatkan bagi pembiayaan pembangunan, terutama bagi penanganan pembangunan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu pengembangan central dan sebagai lembaga kebijakan makro system pengelolaan moneter. Kerjasama kemitraan ini akan dapat mengatasi kendala persaingan dan legal framework, manajemen, dan organisasi BPR untuk dapat beroperasi. Melalui kerjasama ini secara bertahap BPR dapat membangun dirinya menangani kegiatan ekonomi rakyat cepat atau lambat, karena alasan efisiensi, akan ditinggalkan bank-bank umum berskala besar, seperti terlihat dalam sejarah perekonomian negara-negara maju.

1.2. Tujuan

Merancang skema jaringan kerjasama pendanaan yang efektif dan efisien untuk koperasi dan usaha kecil

1.3. Ruang Lingkup

1. Identifikasi lembaga keuangan di daerah studi
2. Melihat komposisi pembiayaan USP/KSP dan BPR
3. Menganalisa peranan lembaga-lembaga terkait dalam jaringan kerjasama pendanaan.
4. Menentukan syarat-syarat terciptanya kerjasama pendanaan

1.4. Metodologi

1.4.1. Lokasi Studi

Studi dilakukan di Propinsi Jawa Barat (Kab. Pekalongan, WKBI Tegal), Jawa Timur (Kab. Malang WKBI Malang) dan Sumatera Barat. Pada masing-masing daerah penelitian mempunyai potensi pengembangan yang prospektif, terutama untuk pengembangan ekonomi rakyat.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka
2. Observasi lapangan :profil BPR yang dipilih secara *purposive*, pendapat dan tanggapan pengelola BPR.

1.4.3. Metode Analisis

Analisis yang dilakukan adalah **Analisis Mapping**, yakni berusaha mengidentifikasi dan kemudian menyusun asumsi yang membentuk kesualitas sampai akhirnya dapat dipetakan kompleksitas permasalahan dan bagaimana pemecahan secara efektif dan rasional.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

POLA PENGEMBANGAN JARINGAN BPR

BPR pada umumnya diharapkan pada skala ekonomi usahanya. Jumlah pelanggan yang terbatas dipedesaan membatasi ruang geraknya untuk menciptakan pasar yang luas bagi kegiatannya. Terbatasnya jumlah pelanggan baik untuk sumber dana maupun sebagai jasa (kredit) BPR, tidak memungkinkan untuk menciptakan hasil yang memadai bagi biaya operasionalnya. Menyadari hal tersebut diatas sejalan dengan paket Deregulasi 27 Oktober, telah dikeluarkan peraturan tambahan pada tanggal 25 Maret 1989, dimana ditetapkan bahwa setiap BPR diizinkan untuk membuka cabang dan pos pelayanan di kecamatan yang bersangkutan dengan hanya memberitahukan kepada Bank Indonesia untuk memenuhi fungsi pengawasan mereka.

Tetapi dalam hal pengembangan system BPR yang mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan efektifitas dan daya saing serta daya tahannya dalam melayani pengembangan ekonomi rakyat dengan membuka cabang dikecamatan lain, perlu dahulu meminta izin dari Menteri Keuangan. BPR yang telah berkembang dengan baik, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 22/kmk. 017/1993, tertanggal 26 Februari 1993, dapat pula membuka cabangnya di kabupaten, propinsi dan bahkan di ibu kota Negara dengan memenuhi persyaratan tambahan modal sesuai dengan ketentuan agar BPR menambah modalnya menjadi Rp. 1 Milyar untuk tingkat kabupaten, sedangkan bagi propinsi menjadi Rp. 3 Milyar dan Rp. 10 Milyar bagi ibu Kota Negara.

Dengan mengikuti alur garis kebijakan ini, BPR dengan pola Credit Union, secara bertahap dapat membangun dirinya dengan menggabungkan aktivitas beberapa bank perkreditan rakyat perkabupaten, yang secara sistematis dengan berjalannya waktu ditingkatkan pula menjadi propinsi dan akhirnya menjadi *national federation* yang menyatukan kegiatan bank perkreditan rakyat antar propinsi menjadi jaringan nasional. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan merger antar BPR, fungsi membuat koperasi tingkat dua (*secondary cooperatives*), seperti pusat koperasi BPR jika berbadan hukum koperasi. Pola ini selain memungkinkan pembangunan organisasi dengan murah dan membagi resiko lebih kecil, selanjutnya menyebabkan lebih berakarnya organisasi dalam masyarakat untuk membentuk suatu kekuatan yang mapan guna menangkal penguasaan ekonomi rakyat dari penetrasi permodalan besar.

Kehadiran organisasi pemeraksa, penunjang dan pemersatu Dekopin sebagai organisasi pengembang ekonomi rakyat sangat penting dan mengamankan penguasaan ekonomi rakyat dari pelaku ekonomi yang hanya mempertimbangkan masalah untung rugi jangka pendek

semata. Penggabungan kegiatan prasarana kegiatan prasarana keuangan ini dengan prasarana pemasaran dan perdagangan kedalam satu paket prasarana yang merupakan pola pendekatan untuk menangani pembangunan ekonomi rakyat, dapat dijadikan model dalam pengembangan ekonomi rakyat. Melalui pembangunan prasarana tersebut maka perlindungan terhadap ekonomi rakyat akan lebih terjamin, yang dilain pihak tetap mendorong pengembangan kegiatannya. Melalui perasarana yang disediakan ini maka rakyat secara bersama-sama dan demokratis dapat membangun kekuatan ekonominya sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional dalam tatanan ekonomi global.

Saat ini BPR ditugaskan untuk berusaha dalam :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sertifikat deposito, dan/tabungan pada bank lain.

Sedangkan dalam kegiatan operasionalnya, BPR dilarang untuk :

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan pernyataan modal
4. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 undang-undang No7/1992.

Batasan diatas membutuhkan strategis pengembangan simpanan masyarakat sebagai unit bagi usaha terpisah yang berusaha sendiri dalam pangsa pasar yang sama. Dengan pola yang demikian maka persaingan antar BPR tidak mungkin dapat dihindari.

Pola penanganan Credit union uang dikembangkan pada beberapa Negara maju dapat diterapkan dalam mengembangkan BPR ini. Didalam penerapannya, inisiatif pendirian BPR dapat diprakarsai oleh organisasi sosial kemasyarakatan seperti Dekopin melalui jaringan Usaha Koperasi (JUK-DEKOPIN) untuk selanjutnya dikembangkan dengan mengundang anggota masyarakat sebagai pemegang saham ataupun penyimpan dana dengan bunga yang tetap sesuai perjanjian dalam kurun waktu tertentu. Prakarsa Dekopin ini akan menjamin proses pengambilan keputusan dan pengelolaannya, tetapi dilain pihak tetap mudah memperoleh dana untuk pertumbuhan dan untuk penanganan pembiayaan program pembangunan masyarakat tersebut selanjutnya.

Credit Union mengembangkan kelompok masyarakat daerah usahanya dengan cara menumbuh kembangkan tabungan masyarakat dalam nilai satuan relatif lebih kecil karenanya tidak efisien untuk dikembangkan melalui pasar modal. Dengan meningkatkan tabungan anggota yang disimpan dalam badan usaha, yang selanjutnya dipergunakan untuk membantu modal dari usaha anggotanya, credit union dapat membantu peningkatan usaha anggotanya tersebut. Setiap calon peminjam terlebih dahulu harus menjadi anggota credit union dengan memenuhi simpanan wajib dan kewajiban lainnya sebagai anggota. Selanjutnya mereka memperoleh pinjaman modal kerja sesuai dengan kebutuhan yang dikalkulasikan berdasarkan proyeksi perputaran usaha yang mungkin dicapainya. Credit union juga memberikan informasi yang memungkinkan setiap usaha anggota bekerja dengan usaha yang sejenis untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan menguntungkan.

Pola kerja setiap unit BPR yang bekerja dalam sistem untuk menjadi infrastruktur pengembangan ekonomi rakyat ini, dirancang untuk memberikan pelayanan kepada :

1. Para pedagang yang menyalurkan produksi dan menyediakan kebutuhan masyarakat,
2. Produsen komoditi masyarakat dan petani yang bersama-sama mengembangkan komoditi yang menciptakan nilai tambah yang besar serta sesuai dengan permintaan pasar dan yang secara keseluruhan mencapai skala ekonomi yang baik dan dibutuhkan oleh pasar.

Bagi peningkatan kegiatan khususnya petani, jaringan model BPR diprogramkan untuk secara berkesinambungan menjalin hubungan kerjasama dengan Bank Umum yang telah mendapatkan fasilitas dan Bank Indonesia, untuk memperoleh kredit program, unit BPR diwajibkan untuk menolong anggotanya maupun masyarakat yang berusaha diwilayah kerjanya untuk mengadministrasikan program tersebut dengan baik, disamping mengaitkannya dengan prasarana pemasaran yang dikembangkan oleh sistem acuan terpadu ini pada daerah kerja yang sama, yang berjalan paralel dengan prasarana pendanaan.

Organisasi penanganannya disiapkan menciptakan system pengawasan yang baik bagi para pelanggannya melalui organisasi petugas dan Pembina kredit yang bertugas melakukan pengelolaan dan pengawasan.

BAB III

DISKRIPSI WILAYAH STUDI

3.1. JAWA BARAT

3.1.1. Lokasi studi

Untuk wilayah Jawa Barat, lokasi studi yang diambil adalah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon terbagi atas 6 kewedanan, 23 kecamatan, dan 424 desa dengan klasifikasi desa swasembada. Berdasarkan tipologinya, desa-desa di Kabupaten Cirebon terbagi atas 5 desa nelayan 250 desa persawahan, 2 desa industri kecil dan 167 desa jasa dan perdagangan.

Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Cirebon atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 sebesar 1.907.924,80 juta rupiah. Dibandingkan dengan PDRB pada tahun 1994 sebesar 1.644.940,33 juta rupiah, berarti pada tahun 1995 telah mengalami kenaikan sebesar 16,03%. Kenaikan ini masih lebih kecil bila dibandingkan dengan kenaikan PDRB Jawa Barat (tanpa migas) pada periode yang sama, yaitu sebesar 17,90 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan sebesar 8,05 persen dari 1.526.057,21 juta rupiah (tahun 1994) menjadi 1.648.898,10 juta rupiah pada tahun 1995. Walaupun pertumbuhan PDRB Jawa Barat yang mencapai angka tertinggi selama ini 8,61%. Peranan PDRB Cirebon atas dasar harga berlaku terhadap provinsi Jawa Barat pada tahun 1995 disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kenaikan dan Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten Cirebon (tanpa Migas) Menurut Sektor Tahun 1995

No	Sektor	Persentase Kenaikan	
		Cirebon	Jawa Barat
1	Pertanian	9,67	10,72
2	Pertambangan dan Penggalian	12,45	24,41
3	Industri Pengolahan	26,19	25,78
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	15,32	8,00
5	Konstruksi/Bangunan	17,17	19,39
6	Perdag, Hotel dan Restoran	19,18	13,23
7	Pengangkutan dan Komunikasi	16,64	18,67
8	Keuangan, persewaan dan Jasa Per	16,26	12,95
9	Jasa-Jasa	11,32	17,03
	PDRB	16,03	17,90

Dari tabel1. dapat dilihat bahwa sektor industry pengolahan mengalami kenaikan terbesar berdasarkan harga berlaku (21,19%), disusul sector perdagangan, hotel dan restoran (19,18%). Sedangkan sector pertanian menempati urutan terendah (9,7%). Sektor-sektor yang mengalami kenaikan diatas rata-rata adalah sektor konstruksi (17,17%) sektor pengangkutan dan komunikasi (16,64%), dan sektor keuangan,persawahan dan jasa perusahaan (16,26%). Sedangkan sector-sektor lainnya mengalami kenaikan di bawah rata-rata. Sumbangan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon terhadap PDRB Jawa Barat (tanpa migas) sedikit mengalami kenaikan dari 2,72% menjadi 2,76%.

3.1.2. Lembaga Keuangan Daerah

a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Secara garis besar, BPR di Jawa Barat dibagi atas tiga wilayah kerja BI (WKBI), yaitu WKBI Bandung, WKBI Cirebon dan WKBI Tasikmalaya. Adapun jumlah BPR masing-masing WKBI Desember 1996 dapat dilihat pada tabel 2.berikut

Tabel 2. Jumlah BPR di wilayah Kerja BI Jawa Barat Desember 1997

WKBI	BKPD	Kop BP	KOP BPR	PT BPR	Jumlah
Bandung	84	2	3	2	188
Cirebon	70	0	4	1	90
Tasikmalaya	49	0	7	0	65
Jumlah	203	2	14	3	343

Hasil survey yang dilakukan terhadap profil di PT BPR ada di Kabupaten Cirebon menunjukkan seperti yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Survey Profil Dua BPR di Kabupaten Cirebon

	PT BPR BALDAH SENTOSA	PT BPR DIPON SENTOSA
Total Asset (per 31/03/1997)	Rp 1.288.600,00	1.288.700,00
Omset	Rp 24.000.000,00	23.000.000
Komposisi Pembiayaan Usaha yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian 5% • Perdagangan 55% • Konsumsi 20% • Lain-lain 20% 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian 10% • Perindustrian 15% • Perdagangan 45% • Jasa 15% • Lain-lain 15%
Komposisi Pembiayaan usaha (Rp 000)	<ul style="list-style-type: none"> • Sendiri : 396.523 • Disetor : 253.600 • Nasabah : 142.923 	<ul style="list-style-type: none"> • Sendiri : 250.00 • Disetor : 200.00 • Pihak lain 12.500
Jenis Kredit	<ul style="list-style-type: none"> • Umum investasi dan modal kerja 2,25% • Khusus, fasilitas pendidikan dan ibadah bunga 2,5 5 	<ul style="list-style-type: none"> • Umum modal kerja & profesi • Khusus pendidikan • Bunga kredit 2% system pengembalian tergantung kesepakatan
Bunga yang harus dibayar ke pihak lain	15% s/d 12% per tahun	1,5% per bulan
Tanggapan tentang kerjasama BPR dengan jaringan USP		Adanya kerjasama antara BPR dengan KSP/USP dalam mengembangkan permodalan koperasi sangat bagus.

b. Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan penilaian kesehatan terhadap 5 KSP yang aktif di Kabupaten Cirebon, didapat hasil penilaian sebagai berikut :

Kategori	:	Jumlah	Rentang Skor
Sehat	:	2	81-100
Cukup Sehat	:	1	66-81
Kurang Sehat	:	2	51-66
Tidak Sehat	:	-	0-51

Aspek yang dinilai meliputi :

1. Permodalan 25%

Rasio modal sendiri dengan jumlah Pinjaman Diberikan (PD) yang beresiko. Modal sendiri terdiri dari : simpanan pokok, simpanan wajib, hibah dan cadangan.

2. Kualitas Aktiva Produksif (KAP) : 30%

KAP terdiri dari dua bagian. Nilai KAP I (bobot 25%) adalah 100 dikurangi rasio antar Rasio Pinjaman Bermasalah (RPB) dengan PD. Total RPB dihitung berdasarkan jumlah dari 50% pinjaman kurang lancar, 75% pinjaman diragukan dan 100% pinjaman macet. Sedangkan KAP II (bobot 5%) adalah nilai rasio antar Cadangan Resiko dengan RPB di kali 100.

3. Manajemen : 25%

Penilaian manajemen meliputi Permodalan, Kualitas Asset, Pengelolaan Rentabilitas dan Likuiditas dengan bobot masing-masing 5%.

4. Rentabilitas : 10%

Rentabilitas ditinjau dari dua segi. Pertama; rasio SHU sebelum pajak dengan Total asset dikali 5 (lima) Kedua; 100 dikurangi rasio Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional. Bobot masing-masing 5%.

5. Likuiditas : 10%

Likuiditas merupakan rasio antara Pinjaman Diberikan dengan Dana Diterima (DD) terdiri atas; modal sendiri, modal pinjaman, modal penyertaan, dan simpanan diterima,

Tabel 4. Hasil penilaian Terhadap Lima KSP yang Aktif di Kabupaten Cirebon.

KSP	Modal	KAP	Manajemen	Rentabilitas	Liguditas	Total Skor
Sumber Jaya	25	25	17	(0,09)	5	72,16
Dharma Jaya	25	27,50	25	0,05	5	52,55
Eka Karya Dua	25	25	25	0,03	5	82,55
Marga Jaya	25	23,41	25	0,02	5	80,03
Mitra Jaya	25	25,50	17	(3,96)	5	83,43

Catatan :

Total Skor KSP Sumber Jaya dan KSP Mitra Karya sebenarnya mencapai rentang skor cukup sehat tetapi karena rentabilitasnya negative (rugi;biaya operasional lebih besar dari pendapatan operasional) maka dikategorikan sebagai KSP kurang sehat.

3.2. Jawa Tengah.

3.2.1. Lokasi Studi

Wilayah Kerja Kabupaten Pekalongan terbagi atas 6 wilayah kerja Pembantu Bupati, 6 kecamatan dengan 270 desa swasembada. Penduduknya berjumlah 737.149 orang (Bps 1995). Lapangan kerja yang digeluti oleh penduduk di daerah ini :

Tabel 5. Jumlah Pekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

Lapangan Pekerjaan	Jumlah
1. Petani Sendiri	105.588
2. Buruh Tani	101.032
3. Nelayan	7.793
4. Pengusaha	7.056
5. Buruh Industri	47.807
6. Buruh Bangunan	23.311
7. Perdagangan	47.998
8. Pengangkutan	5.201
9. PNS/ABRI	9.907
10. Pensiunan	2.596
11. Lain-lain	158.697

Sumber BPS Kab Pekalongan 1996

Produk Domestik Regional Bruta (PDRB) Kabupaten Pekalongan atas dasar harga berlaku pada tahun (1995) adalah sebesar Rp 806.627.251.000. Dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya adalah sebesar Rp 699.088.406.999 maka pada tahun

1994 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mengalami kenaikan sebesar 7.04% dari Rp 699.088.406.000 , menjadi Rp 748.291.193.

Kontribusi masing-masing bidang usaha terhadap PDRB dan indeks perkembangan berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan pada tahun 1995 disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Peranan Sektor Usaha Terhadap PDRB dan Indeks Perkembangan Berdasarkan Harga Berlaku tahun 1994-1996

Bidang Usaha	Harga Berlaku (%)			Harga Konstan (%)		
	1993	1994	Indeks	1993	1994	Indeks
1. Pertanian	26,19	23,12	1,86	26,19	22,91	(6,36)
2. Pertambangan	25,51	27,92	9,76	0,75	0,73	3,45
3. Industri Pengolahan	0,75	0,71	26,30	25,51	28,01	17,56
4. Listrik Gas & Air Minum	0,60	0,61	16,79	0,60	0,62	11,57
5. Bangunan	5,05	4,92	12,45	5,05	5,00	6,17
6. Perdagangan	18,33	19,62	20,20	18,83	19,57	11,77
7. Pengangkutan	3,36	4,08	32,18	3,56	3,96	19,20
8. Keuangan	5,67	5,56	13,19	5,67	5,56	4,93
9. Jasa-Jasa	13,85	13,48	12,18	13,85	13,54	4,61
PRDB	100	100	15,38	100	100	100

Dari Tabel 6 di atas terlihat bahwa sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami kenaikan terbesar berdasarkan harga berlaku (32,18%), diikuti sektor Industri (26,30%), Perdagangan (20,20%) diikuti sektor listrik, Gas dan Air Minum (16,79%). Sedangkan sektor-sektor lain mengalami kenaikan di bawah rata-rata.

3.2.2. Perkembangan perbankan Di Jawa Tengah

a. Bank Umum dan BPR

Perbankan Jawa Tengah sebagai bagian dari perbankan nasional hingga akhir ini 1996/1997 menunjukkan adanya peningkatan beberapa indikator kegiatannya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kantor yang beroperasi mencapai 750 kantor bank umum dan 408 kantor BPR. Meskipun demikian, ekspansi jaringan kantor bank umum di Jateng masih terkonsentrasi di daerah-daerah seperti Kodya Semarang, Surakarta, Magelang, Pekalongan dan Kabupaten Kudus, sehingga penghimpunan dana maupun penyaluran kredit relatif terpusat di daerah-daerah ini pula. Konsentrasi ini tidak dapat dilepas dari motif pendirian bank yang antara lain mengikuti perkembangan aktivitas perdagangan/perekonomian suatu daerah.

Sementara perkembangan pendirian BPR dalam semester ini tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, bahkan dalam semester ini tidak ada pendirian BPR baru maupun perluasan jaringan BPR yang telah ada. Dengan demikian jumlah BPR yang beroperasi hingga akhir September 1996 tetap sebanyak 405 BPR dengan 408 kantor dengan total aktiva sebesar Rp 416 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 8,62% dari total aktiva pada akhir tahun 1995/1996.

Menurut sebaran regionalnya, lokasi pendirian BPR di Jawa Tengah relatif lebih merata dibandingkan dengan bank umum, karena volume usaha BPR relatif lebih kecil dan wilayah atau jangkauan operasinya juga lebih sempit dibanding bank umum sehingga memungkinkan BPR untuk merangkul pelaku-pelaku ekonomi berskala kecil dan relatif kurang terjangkau oleh bank umum. Pada umumnya, di setiap daerah tingkat II di Jawa Tengah telah beroperasi rata-rata 10 sampai 15 BPR, dengan Dati II terbanyak jumlahnya BPRnya adalah Kabupaten Boyolali, 25 buah dan Kendal 28 buah. Sedangkan dari 35 Dati II yang ada, 7 diantaranya memiliki BPR kurang dari 5 buah, yaitu Kodya Salatiga, Magelang, Tegal, Pekalongan, Surakarta, dan kabupaten Wonosobo.

Secara keseluruhan, pada semester I 1996/1997 di Jawa Tengah terdapat 405 BPR, yang terbagi atas 4 WKBI, yaitu Semarang, Solo dan Tegal dengan total aktiva mencapai Rp 416 milyar (naik 8,6%). Selain itu juga terdapat 10 PT, Bank Pasar, 2 Koperasi BPR dan 1 Koperasi Bank Pasar.

Tabel 7. Jumlah BPR masing-masing WKBI di wilayah Jawa Tengah per Desember 1996

WKBI	PT BPR	PD BPR	Kop BPR	PT BPR	BPR BKK	Kop Bp
Semarang	6	1	1	94	107	0
Solo	2	2	1	55	35	1
Purwokerto	1	1	0	13	34	0
Tegal	1	1	0	20	26	0
Jumlah	10	5	2	182	202	1

Sumber BI Pusat 1996

Di Kabupaten Pekalongan sendiri, hingga September 1996 terdapat 4 buah BPR dan 10 BKK (Badan Kredit Kecamatan) yang termasuk kedalam WKBI Tegal.

Dengan asumsi jumlah penduduk Jawa Tengah (menurut proyeksi BPS) tahun 1996 sebanyak 29,69 juta jiwa, maka dengan jaringan kantor bank umum sebanyak 1.474 buah (termasuk BRI unit) dan 408 kantor BPR, maka rasio antara kantor bank terhadap penduduk adalah 1:15.776 jiwa, sedikit mengalami perbaikan dari semester sebelumnya; 1:16.458 jiwa (dengan jumlah kantor 1.804). Apabila dibandingkan dengan rasio tingkat nasional (1:10.116 jiwa), maka rasio Propinsi Jawa Tengah sedikit lebih rendah, sehingga masih memungkinkan untuk bertambahnya kantor bank umum maupun BPR.

b. Koperasi/Unit Simpan Pinjam

Selain Bank Umum dan BPR, di Kabupaten Pekalongan terdapat sejumlah Koperasi yang memiliki Unit Simpan Pinjam yang terdiri dari 17 USP-KUD dan 36 USP-KOPTA, yang kesemuanya dinilai aktif dalam menjalankan usahanya.

Profil Unit Simpan Pinjam Koperasi Perkotaan (KOPTA) yang beroperasi secara aktif di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9 .

Tabel 8. Profil USP KUD yang aktif di Kabupaten Pekalongan

Nama KUD	Jml Anggota dilayani	Vol. Usaha (000)	Total Asset (000)
1. Sidotentrem	187	23.500	26.750
2. Wuriyaya	174	65.750	14.800
3. Kasesi	386	59.100	64.700
4. Bhakti	336	85.885	34.800
5. Mahaneru Jaya	83	2.670	2.200
6. Karanganyar	102	25.500	12.300
7. Wirades	351	116.720	33.175
8. Pertiwi	298	32.525	35.251
9. Wonopringgo	71	2.650	2,800
10. Minoyoso	129	34.800	12.274
11. Talun	152	33.240	11.835
12. Subur	55	13.590	10.780
13. Budhikarya	62	8.725	7.852
14. Kedungweni	567	99.890	72.100
15. Barokah	52	3.345	2.886
16. Peninggiran	148	11.405	12.272
17. Berkah	54	3.570	3.773

Sumber : Depkop dan PKM Kabupaten Pekalongan 1997

Tabel 9. Profil USP KOPTA yang aktif dikabupaten Pekalongan.

Nama KUD	Jml Anggota dilayani	Vol. Usaha (000)	Total Asset (000)
1. KPN Kesesi	363	299.400	339.000
2. KPN Kopesi	41	34.690	33.479
3. KPN Kopenda	723	9.440.889	1.451.423
4. KPN Arena	185	87.760	269.413
5. KPRI Gemi	411	275.171	393.457
6. KPN Mekar	183	149.530	178.394
7. KPN Arum	250	46.986	310.000
8. KPN Rasa	224	251.076	233.090
9. KPN T.Bakti	68	55.437	99.279
10. KPN Mandiri	363	184.500	430.854
11. KPN B.Sejatera	179	201.000	66.062
12. KPN Rama	206	34.135	247.900
13. KPN Tutwuri	321	582.235	203.700
14. KPN Garuda	50	93.943	35.888
15. KPN Tenteram	510	281.878	683.577
16. KPN T.Arum	124	35.531	205.411
17. KPN Giat	346	33.707	362.703
18. KPN Handayani	58	13.063	51.368
19. Bakti	73	67.835	34.621
20. KPN Koporen	39	56.694	15.110
21. KPN Kopen	88	21.475	42.252
22. KPN S. Rukun	137	120.401	117.500
23. KPN Sigma	31	47.887	18.488
24. KPN IKB	42	62.303	75.302
25. KPN M. Jaya	204	57.979	49.691
26. KPN Tata Santo	160	10.567	77.164
27. Kopkar Keluarga	153	81.000	54.824
28. Kopkar Prisetex	221	98.424	18.674
29. Kopkar ajitex	825	8.556	30.805
30. Kopkar Prosmatex	819	197.268	165.355
31. Kopkar Citra	139	83.666	14.153
32. Kopkar KWK	390	130.274	239.783
33. Prim Kopti	637	105.521	84.077
34. Prim Koppol	454	39.170	187.814
35. Koppas B. Jaya	879	10.5521	114.472
36. Kop Wanita Kartini	238	39.170	43.638

Sumber : Depkon dan PKM Kabupaten Pekalongan 1997

C. Dana Masyarakat

Sampai dengan Semester I 1996/97 jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp. 10.824 milyar (naik 12,61%) dibandingkan dengan akhir tahun anggaran 95/96 atau meningkat 26,18 % dari smester yang sama tahun anggaran yang lalu, seperti terlihat pada Teble 10. Berikut.

Tabel 10. posisi Penghimpunan Dana dan Pertumbuhannya 1994/95-Smt I 1996/97 (milyar)

Keterangan Dana	1995/1996		1995/1996		1996/1997
	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I
- Posisi	6.797	7.708	8.606	9.613	10.859
- Pertumbuhan	9.26		11.65	11.730	12.96

Sumber BI Semarang (1997)

Adapun bentuk dana yang dihimpun dapat dikatagorikan dalam 3 kelompok yaitu Giro, Deposito, (Simpan Berjangka) dan Tabungan. Dalam Sementara 1996/97, jumlah dana yang dihasilkan dalam bentuk giro sebesar Rp. 1904 milyar (18%), deposito Rp 4.225 milyar (39%) dan Rp. 4.731 milyar (44%) dalam bentuk tabungan pertumbuhan menghimpun dana tsb dapat dilihat pada tabel berikut.

Apabila didasarkan pada kelompok bank maka jumlah dana yang telah oleh masing-masing kelompok adalah :

Bank umum swasta nasional : Rp 6.292 Milyar (57.94%)
Bank umum pemerintah : Rp 4.229 Milyar (39.59%)
BPR : Rp 268 Milyar (2,47%)

Tabel 11 Pertumbuhan Penghimpunan Dana, TA 1994/95-Smt I 1996/1997. (dlm milyar)

Keterangan Dana	1994/1995		1995/1996		1996/1997
	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I
Giro	18,04	-3,58	23,29	2,28	24,69
Deposito	7,76	34,73	9,74	13,72	11,04
Tabungan	7,23	5,19	9,25	13,64	10,51

Sumber BI Semarang (1997)

D. Penyalur Kredit

Kredit Umum

Dalam semester I 1996/1997 ekspansi kredit perbankan Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar Rp 971 milyar (meningkatkan 8.86%) dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada semester sebelumnya sebesar 646 milyar (6,26%). Peningkatan ekspresi kredit perbankan tersebut menyebabkan posisi kredit sampai semester ini sebesar Rp 11.929 milyar.

Tabel 12. Posisi dan pertumbuhan Penyaluran Kredit perbankan 7 KUK. (dalam milyar)

Keterangan Dana	1994/1995		1995/1996		1996/1997
	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I
Kredit					
Posisi (milyar)	8.723	9,340	10.312	10,958	11,929
Pertumbuhan %	15,06	7,07	10,41	6.26	8,86
KUK					
Posisi (Milyar)	3.221	3,476	3.806	4.095	4.540
Pertumbuhan %	16,91	7,92	9.49	7,59	10,87

Sumber BI Semarang (1997)

Kenaikan kredit pada masing-masing jenis kredit dalam semester I ini adalah :

1. Kredit modal kerja naik Rp 545 milyar (7,89%)
2. Kredit Konsumsi, naik Rp 257 milyar (14,33%)
3. Kredit inventasi, naik Rp 169 milyar (7,49%)

Dengan pertambahan ini, maka posisi kredit perbankan Jawa Tengah hingga akhir September 1996 sebesar Rp. 7.455 milyar dalam bentuk kredit modal kerja Rp 2.424 milyar berupa kredit investasi dan kredit konsumsi sebesar 2.050 milyar.

Penyaluran kredit secara sektoral mengalami perbaikan yang relatif merata dibandingkan semester sebelumnya. Hampir seluruh sektor mengalami peningkatan, kecuali sektor listrik dan air, serta sektor pengangkutan yang mengalami sedikit penurunan, masing-masing sebesar 2,44% dan 4,63%

Sektor perindustrian dan sektor perdagangan masih mendominasi penyaluran kredit perbankan masing-masing 33,12% dan 31,19% dari total kredit. Secara sektoral, peningkatan kredit sebesar Rp 971 milyar terutama disebabkan oleh peningkatan kredit sektor perdagangan sebesar Rp 402 milyar (41,40%) diikuti sektor jasa-jasa Rp 101 milyar (10,40%).

- Kredit Usaha Kecil (KUK)

Jumlah KUK yang disalurkan perbankan Jawa Tengah selama Semester I 1995/96 mengalami kenaikan sebesar Rp 445 milyar (10,87%) dari semester II 1995/96 sehingga penyaluran KUK pada Semester laporan menjadi sebesar Rp 4.540 milyar. Peningkatan ini dialami oleh bank umum sebesar Rp 409 milyar (91,09%) dan BPR sebesar Rp 36 milyar (8,09%) Kenaikan KUK tersebut merupakan 45,83% dari total kenaikan bersih kredit perbankan Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa usaha-usaha berskala kecil disamping merupakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah tanggal 29 Mei 1993.

Secara, sektoral perdagangan mengalami peningkatan bersih tertinggi yaitu sebesar Rp 174 Milyar (39,01%). Sektor lain yang juga mengalami peningkatan pertambahan nilai sebesar Rp 35 Milyar (7,85%) dan Rp 33 Milyar (7,40%). Sedangkan sektor perindustrian dan pertanian masing-masing meningkat sebesar Rp 6 Milyar (1,35%) dan 22 Milyar (4,93%).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebesar Rp 2.329 milyar (51,09%) dari KUK dipergunakan untuk modal kerja Rp 497 milyar (10,94%) untuk investasi dan selebihnya yaitu Rp 1,724 milyar (37,97%) digunakan untuk keperluan lainnya.

Tabel 13 Perkembangan KUK menurut Jenis Penggunaan (Juta rupiah)

Periode	Investasi		Modal Kerja		Lainya	
	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II	Smt I	Smt II
1994/1995	373	454	1.908	1.913	940	1.109
1995/1996	467	463	2.027	2.108	1.312	1.524
1996/1667	497	-	2.320	-	1.724	-

Sumber : BI Semarang 1997

3.3 Jawa Timur

3.3.1 Lokasi studi

Lokasi studi di wilayah Jawa Timur adalah Kabupaten Malang (WKBI Malang). Kabupaten Malang berdasarkan hasil registrasi pada tahun 1995 berpenduduk 2.243.591 jiwa. Penduduk tersebut tersebar di 33 kecamatan, 16 kelurahan dan 392 desa dengan luas total wilayah 3,395,13 km². Seluruh desa yang berada di kabupaten Malang berstatus desa Swasembada.

Produk Domestik bruto (PDRB) Kab. Malang berdasarkan yang berlaku pada tahun 1995 bernilai 2.094.257,7 juta rupiah meningkat sebesar 18,21% dibanding tahun sebelumnya. Bila didasarkan dengan harga konstan (1994) maka nilainya sebesar 1.080.238,2 juta rupiah yang berarti naik 7,71% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 14 Kenaikan PDRB atas dasar yang berlaku di Kab Malang per Sektor Tahun 1994-1995

Sektor	1994(%)	1995(%)
Pertanian	3,38	5,58
Pertambangan dan Pengalihan	3,93	6,93
Industri Pengolahan	21,57	19,29
Listrik dan Air Minum	2,1	5,67
Bangunan	8,98	-20,46
Perdagangan, Hotel & Restoran	11,31	10,28
Bank & L. Keuangan	4,65	9,55
Angkutan & Komunikasi	9,4	20,21
Sewa Rumah	8,0	13,28
Pemerintahan dan jasa-jasa	10,25	17,06
PDRB	14,13	18,21

Pada tabel diatas terlihat bahwa yang paling tinggi kenaikan PDRB atas dasar harga yang berlaku adalah sektor angkutan dan komunikasi (20,21%) disusul sektor industri pengolahan sebesar 19,29% dan terkecil adalah bangunan yang mengalami penurunan sebesar 20,46% lihat table 15

Tabel 15. Distribusi persentasi PDRB Ka. Malang atas Dasar Harga Berlaku tahun 1994-1995 dan PDR Jawa Timur 1995.

Sektor	1994 (%)	1995 (%)	1996 (%)
Pertanian	37.30	35.51	20.94
Pertambangan dan Pengalihan	0.68	0.66	0.67
Industri Pengolahan	12.30	13.83	24.44
Listrik dan Air Minum	1.51	1.45	0.98
Bangunan	2.47	2.52	6.19
Perdagangan, Hotel dan Restoran	24.44	25.33	26.32
Bank & L keuangan	4.78	4.66	6.70
Angkutan Komunikasi	4.58	4.56	6.70
Sewa Rumah	2.86	2.74	2.11
Pemerintahan	6.98	6.74	6.68
Jasa-jasa	3.33	3.05	11.68

Terlihat bahwa walaupun dengan pertumbuhan yang paling tinggi diantara sektor perekonomian yang ada, pada tahun 1994 angkutan dan komunikasi mempunyai sumbangan yang relative kecil terhadap PDRB Kab. Malang (4.66%). Tiga sektor ekonomi yang paling besar memberikan sumbangan terhadap PDRB berdasarkan yang berlaku (1995) di Kab. Malang adalah pertanian (35.51%), perdagangan, hotel, dan restoran (20.94%), dan industry pengolahan (13.83%). Sedikit berbeda urutannya dengan distribusi perentasi PDRB Jawa Timur, industry pengolahan yang paling besar (22.44%). Diikuti oleh pertanian (20.94%), dan perdagangan, hotel dan restoran (20,24%).

3.3.2. Sektor Perbank

Kekuatan sektor perbankan di Jawa Timur dapat diketahui dengan mengamati jumlah aktivas/asset yang dimiliki oleh seluruh bank di Jawa Timur baik dari kelompok bank umum dan bank Perkreditan Rakyat. Menurut laporan Bank Indonesia Surabaya per Desember 1996 jumlah total aktiva Bank Pemerintah di Jawa Timur adalah 14.470.414 juta rupiah atau 40.59% dari keseluruhan jumlah aktiva yang ada dipropinsi

yang ada di Jawa Timur, Bank Swasta sebesar 21.034.410 juta rupiah (58.06%) dan terakhir Bank Perkreditan Rakyat sebesar 485.005 juta rupiah. Jadi Bank Umum (pemerintahan dan swasta) memiliki jumlah aktiva sebesar 98.65% dan sisanya BPR sebesar 1,45% lihat Table 16.

Table 16 Jumlah aktiva, unit dan Kantor bank Menurut kelompok di propinsi Jawa Timur Per Desember 1996.

Kelompok Bank	Aktiva (Juta)	Kontribusi (%)	Jumlah Unit	Jumlah Kantor
Bank Pemerintah	14.470.414	40.59	77	1.401
Bank Swasta	21.038.410	58.06	33	113
BPR	485.005	1.35	351	355
Jumlah	36.233.829	100	451	1.869

Untuk daerah II Tingkat Malang, jumlah aktiva Bank adalah sebesar 8,19% dari total jumlah aktiva bank di Propinsi Jawa Timur.

Kredit perbankan yang disalurkan oleh Bank Umum per Desember 1996 di Propinsi Jawa Tengah sebesar 23.081.165 (98.35%) dengan rincian untuk modal kerja sebesar 59.07%. investasi sebesar 24.35% dan lainnya 14.45% dari total kredit-kredit sektor perbankan di propinsi Jawa Timur. Kelompok Bank Perkreditan Rakyat menyalurkan Kredit sebesar inventasi 0.04% modal kerja 1.40% dan lain-lain sebesar 0.17%,

Daerah tingkat II Malang menyalurkan kredit melalui sektor perdagangan sebesar 7.42% dari yang disalurkan oleh sektor perbankan di propinsi Jawa Timur.

a. Bank Perkreditan Rakyat di Kab Malang

Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Malang berjumlah 39 unit (Bi; Perbarindo 1996). Ditambah dengan BPR yang bergaya lama di Kodya Malang akan berjumlah 46 unit. Dua antaranya berbadan hukum koperasi lihat tabel berikut.

Tabel 17 Sebaran Bank Perkreditan Rakyat per Kecamatan di Kabupaten Malang.

Kecamatan	Jumlah BPR
1. Batu	5
2. Kapanjen	5
3. Dampit	3
4. Turen	3
5. Dau	3
6. Singosari	2
7. Gondang Legi	3
8. Tumpang	4
9. Lawing	1
10. Pujon	3

b. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di Kab Malang

Di Kabupaten Malang terdapat Koperasi Simpan Pinjam sebagai 23 unit dan Koperasi Pedagang Pasar sebanyak 11 unit. Koperasi yang aktif hanya 23 unit termasuk Koperasi Pedagang pasar lihat Tabel 18

Table 18 Sebaran KSP/USP per Kecamatan di Kab Malang.

Kecamatan	Jumlah BPR
1. Batu	9
2. Kepanjen	5
3. Dampat	4
4. Turen	1
5. Dau	1
6. Singosari	6
7. Gondang Legi	1
8. Tumpang	4
9. Lawing	3
10. Pujon	1

c. Lembaga Dana dan kredit Pendesaan di kab. Malang

Lembaga ini di Jawa Timur bernama KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil). Pendirian lembaga ini dengan SK Gubernur Kepala Daerah No 197. Badan ini hanya menyalurkan kredit tanpa diperkenankan menerima dana dari pihak ketiga serta menarik simpanan/tabungan dan deposito berjangka dari masyarakat. Lembaga keuangan yang bukan Bank ini dibawah koordinasi langsung pemerintah daerah tingkat I Jawa Timur dengan pembinaan teknis bank pembangunan daerah (Bank Jatim). Pemda daerah tingkat II hanya menyediakan lahan/tanah untuk lembaga KURK sebagai modal pernyetaan. Lembaga yang berdiam di ibukota kecamatan, di Kabupaten Malang tersebar di kecamatan Gedangan. Pagak, Donumulyo, Bantur dan Ampelgading.

Tabel 19. Sebaran Lembaga Keuangan Pedesaan di Kab Malang selain BKD dan non BKD selain LKDP.

Kecamatan	Jumlah BPR	Jml LKDP	Jml KSP
1. Batu	9	-	5
2. Pujon	1	-	-
3. Singosari	6	-	2
4. Lawang	3	-	-
5. Dau	1	-	-
6. Tumpang	4	-	3
7. Pakis	1	-	-
8. Bululawang	-	-	1
9. Gondanglegi	1	-	3
10. Turen	1	-	4
11. Dampit	4	-	2
12. Ampelgading	-	1	4
13. Kapanjen	5	-	5
14. Pagak	-	1	-
15. Donomulyo	-	1	-
16. Gedangan	-	1	-
17. Batur	-	1	-

3.4 Sumatra Barat

3.4.1 Lokasi Studi

Lokasi studi ini merupakan daerah jangkuan oprasional BPR Salindo Empat, yaitu kecamatan IV-Jurai, Kecamatan Batang Kapas dan Kecamatan Bayang, Lokasi ini termasuk wilayah kabupaten pesisir Selatan suatu wilayah pantai barat dari Sumatera Barat, dengan luas 5.749,89 km, Kabupaten Pesisir Selatan ini terdiri dari tujuh kecamatan dan 250 desa. Baerdasarkan perkembangan geografis maka pemerintahan dibantu 6 kecamatan perwakilan yang membawahi 103 desa.

Secara adat wilayah Pesisir Selatan ini terdiri dari 36 Nagari, akan tetapi denagn UU No 5/1979 Tentang Pemerintah Desa yang menyeragam bentuk dan susunan pemerintah Desa/Kecamatan di seluruh Indonesia. Khusus Sumatera Barat wilayah kecamatan terdiri dari Nagari yang pada waktu ada sebanyak 543 Nagari.

Kecamatan IV-Jurai dimana terletak ibukota kabupaten yaitu Painan, sedangkan kecamatannya terdapat disaldo. Sedangkan produk regional bruto (PDRB) Prop, Sumatera Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 Rp. 4.896.044.320 meningkat 28,86% dari tahun 1991 sebesar Rp. 3,766.187.730.

Produk domestik regional bruto (PDRB kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 sebesar Rp. 415.166.140. PDRB ini meningkat dibandingkan dengan tahun 1990 sebesar Rp. 233.456.400

Table 20. Kenaikan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pesisir Selatan menurut Sektor

SEKTOR	Kenaikan (%)
Pertanian	45,00
Pertambangan dan Pengalihan	0,67
Industri	6,21
Listrik dan Air Minum	0,24
Konstruksi	3,46
Perdagangan, Hotrl & Restoran	29,99
Pengangkutan & Komunikasi	2,20
Bank & Lem Keunagan	1,07
Sewa Rumah	2,88
Pemerintahan & pertanian	5,31
Jasa-jasa	2,97
PDRB	28,86

Pada table diatas terlihat bahwa sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB Kab. Pesisir Selatan (45%). Kemudian berturut-turut sektor perdagangan, hotel dan restoran (29,99%), Industri (6,21%) dan sektor pemerintahan dan pertahanan (5,31%), sementara itu sektor bank dan lembaga keuangan lainnya hanya menyumbang 1,07% terhadap PDRB Pesisir Selatan

3.4.2. Penduduk

Dari hasil pencatatan pada akhir 1995, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 428.184 jiwa. Kalau dibandingkan dengan akhir tahun 1991 dengan jumlah 376.680 jiwa. Dan kalau dilihat jumlah penduduk setiap kecamatan ternyata umumnya mengalami kenaikan.

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pesisir Selatan adalah 96, artinya terdapat 96 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan. Dan pada tiga kecamatan wilayah studi rasio jenis kelamin berkisar 92 sampai 96.

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan angka 120, yang berate setiap 100 orang yang produktif menanggung

beban 120 orang yang tidak produktif. Sedangkan angka ketergantungan kecamatan IV-jurai, Batang Kapas dan baying masing-masing 73,90 dan 76 angka ini secara kasar dapat merupakan indicator ekonomi suatu daerah, dimana makin rendah angka ketergantungan maka makin maju ekonomi suatu daerah.

3.4.3 BPR Salindo Empati

BPR Salido Empati merupakan lembaga keuangan bank milik masyarakat di tingkat kecamatan yang didirikan beberapa lembaga dan perorangan. Pada saat ini BPR SE telah berusia 6,5 tahun lebih dikeluarkan ijin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat keputusan No.524/Km.13/1990 pada tanggal 26 Oktober 1990. BPR SE pada awal berdirinya memiliki modal yang disetor oleh pendiri sebanyak Rp 50.000.000,- .

Dari usaha-usaha yang dilakukan, ternyata tabungan merupakan usaha yang paling positif pada waktu awal-awal operasional BPR SE dalam menggarap dana masyarakat. Pada tahun 1990 saldo tabungan tercatat sebesar 16.042.069,27 meningkatkan relatif pesat pada tahun 1991 dengan saldo 77.670.380,00.

Pada tiga(3) bulan pertama (Desember 1990) Deposito yang terserap masih sangat kecil yaitu : Rp 1000.000.000,- dan pada Februari 1991, baru Rp 1.050.000.000,-

Tabel 21. Jumlah Tabungan dan Deposito BPR Salido Empati Tahun 1990 s/d 1996

TAHUN	TABUNGAN (Rp)	DEPOSITO (Rp)
1990	16.042.069,27	100.000,00
1991	77.676.388,00	15.230.000,00
1992	63.419.849,00	44.653.275,00
1993	109.712.742,00	72.681.000,00
1994	129.643.980,00	83.654.000,00
1995	150.745.760,00	92.364.000,00
1996	186.932.322	106.650.000,00

BAB IV

INDITIFIKASI DAN ANALISA SISTEM JARINGAN KERJASAMA

Berdasarkan studi yang telah dilakukan pada 3 wilayah yakni Jawa Barat, Jawa tengah dan Jawa Timur dengan sempel kabupaten Cirebon, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Malang dapat dinyatakan bahwa motif pendirian BPR mengikuti perkembangan aktivitas perekomonian suatu daerah, terutama aktivitas perdagangan. Dari kenyataan ini maka BPR akan berkembang pesat pula, sebab ssektor jasa perbankan merupakan sektor tersier dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah, setelah sektor pertanian (pemanfaatan sumber daya alam) dan industri (pengelolaan)

Sejak pakto 1988 sampai September 1995, telah berdiri 1264 BPR dengan total asset tercatat 2,2 triliyun. Perkembangan pesat BPR telah membawa dampak BPR Bpr bermasalah seputar lamahnya menejemen sampai kredit macet dan penyelewengan oleh oknum pejabat BPR. Ini membawa angin konsolidasi yang dihembuskan oleh BI. Ada tiga trend penting dalam periode setahun akhir yakni : penurunan laju pendirian BPR, suntikan modal dan pinjaman diterima serta penuruan jumlah nasabah BPR.

Perkembangan kinerja BPR menurut data dari Bani Indonesia 1995 adalah seperti table 24. Data perkembangan BPR dibawah ini dengan jelas memperlihatkan kinerja BPR yang telah megalami konsolidasi keuangan pada periode 1995. Ada tiga point penting yakni : penulunan laju pendirian BPR, suntikan modal dan pinjaman bank dan kualifikasi nasabah deposan dan debitur.

Pada semester I 1995, modal BRP meningkat Rp 64 Milyar, yaitu dari Rp 359 Milyar menjadi Rp 423 Milyar. Padahal pada periode ini hanya keluar 23 ijin operasi BPR baru. Bila diasumsikan rata-rata BPR baru ini memiliki modal disektor Rp 200 juta, maka total modal hanyalah Rp 4,6 Milyar, sisanya yang sebesar Rp 59,4 Milyar berupa penambahan modal. Agaknya BPR tengah memantapkan permodalan untuk memenuhi rasio kecukupan modal 8%.

4.1. Aspek Kelembagan

Dalam sejarahnya, kegiatanekonomi pedesaan sesungguhnya bukan tanpa perangkat sama sekali. Perangkat lembaga keuangan non-formal yang tumbuh kembang di lingkungan masyarakat, dan kini dikenal dengan BKD (Badan Kredit Desa) dan LKDP (Lembaga Dana dan

Kredit Perdesaan). Sampai saat ini keberadaan BKD dan LDKP masih sangat potensial bagi peningkatan ekonomi pedesaan.

Badan hukum suatu lembaga pendanaan tingkat “retail” yang mampu melayani kredit mikro sangatlah bermacam-macam, ada yang berupa PT (perseroan terbatas), Pd (perusahaan daerah), koperasi bahwa merupakan lembaga informal.

Tercatat 5.345 BKD dan 1.978 LKDP diseluruh Indonesia (Sumber BI), Pembinaan yang efektif dapat meningkatkan kinerja BKD dan LKP yang pada gilirannya dapat meningkatkan statusnya menjadi BPR. BPR yang tumbuh dari bawah seperti ini dipandang dapat mengemban fungsinya secara utuh sebagaimana disebutkan dalam PP No 71/1992, tentang BPR, yakni menunjang modernisasi dan pelayanan bagi pengusaha kecil.

Istilah BPR mulai digunakan dalam UU Pokok Perbankan No 14 Tahun 1967 sebagai akomodasi sistem lembaga-lembaga keuangan pedesaan tersebut dalam perbankan nasional. Tahun 1988 (Pakto 88) pertumbuhan BPR dipacu. Dan sejak tahun 1992 (UU No 7/1992 tentang perbankan), perbankan Indonesia hanya mengakui bentuk usaha bank, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 1992, pasal 14 disebutkan bahwa dimungkinkan terjadinya penggabungan dari dua atau lebih koperasi, peleburan beberapa koperasi dengan membentuk koperasi baru. Hal ini diperlukan untuk pengembangan dan/atau efisiensi usaha, setelah mendapat persetujuan Rapat anggota masing-masing koperasi.

Pasal 44 UU Koperasi No 25 tahun 1992 menyatakan, bahwa koperasi dapat menghimpun dana, dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam (ayat 1), sedangkan ayat 2 menyatakan bahwa usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi. Dalam satu sisi bahwa praktek koperasi meliputi mekanisme pengumpulan dana baik dari anggota maupun non anggota. Dalam pasal 41 ayat 3 dikatakan bahwa modal pinjam dapat berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Bahkan pada pasal 42, koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari penyetaan.

Dari sisi usaha maka salah satu unit usaha adalah sebagai pengumpulan dana walaupun pada lingkungan terbatas serta pendistribusian dana pada pihak kedua. Dari sisi ini dapat dikatakan bahwa KSP atau unit simpan pinjam (USP) telah menjalankan fungsinya sebagai bank. Undang-undang No 14/1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan mendefinisikan bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

4.2. Kerjasama BPR dan Koperasi Simpan Pinjam

Secara teoritis koperasi sebagai salah satu lembaga yang bertugas menyediakan dana (kredit) berpotensi untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan semisal bank.

Lembaga keuangan lain yang sejalan dengan misi koperasi, terutama untuk mengembangkan usaha kecil, adalah Bank Perkreditan Rakyat karena sama-sama bergerak di basis pedesaan.

Berdasarkan prinsip dan tujuan usaha maka sisi positif pengembangan ke depan adalah dimungkinkan terjadinya proses sinergis kerjasama antara lembaga tersebut. Dari aspek legal koprasipun diperbolehkan menerima dana dari pihak ketiga seperti bank, dan tentu saja BPR yang sama-sama bergerak dipedesaan.

Disamping mempunyai potensi untuk bisa berkerjasama, dua lembaga yang berbeda tersebut menyimpan potensi permasalahan terutama teknis kerjasama (operasional). BPR dan Koprasi merupakan bentuk lembaga yang mengikuti aturan yang berbeda-beda serta dibina oleh departemen yang berbeda pula. Permasalahan yang mungkin akan timbul nantinya antara lain adalah :

1. Adanya pandangan masih rendahnya profesionalisme yang akan merugikan citra bagi BPR untuk mengadakan kerjasama.
2. Mekanisme sindikasi pendanaan dan lending activities pada proses pendanaan.
3. Kemampuan untuk mendistribusikan dana kredit dengan tingkat suku bunga pinjaman yang berbeda.
4. Konsep agunan sebagai syarat untuk mendapatkan kredit dari perbankan.

Kemungkinan bentuk kerjasama adalah :

1. Dengan membentuk lembaga baru, dimana saham lembaga tersebut dimiliki oleh koperasi dan BPR dengan komposisi berdasarkan kedua belah pihak.
2. Tanpa membentuk lembaga baru, tetapi hanya merupakan mekanisme sindikasi pendanaan dengan menentukan tingkat suku bunga dan persyaratan kredit yang telah ditetapkan.

Kemungkinan pertama tidak dapat dilaksanakan, sebab BPR berdasarkan UU No 7. Tahun 1992 tentang perbankan pasal 14 BPR dilarang melakukan penyertaan modal. Yang berarti BPR tidak di ijinakan mendirikan lembaga baru, dimana BPR menyertakan modalnya untuk mendirikan lembaga baru bersama-sama dengan koperasi dan sesama BPR.

Alternatif kedua lebih memungkinkan karena baik koperasi maupun BPR tidak ada aturan yang melarang kerjasama seperti tersebut. Artinya boleh dilakukan, asalkan kerjasama tersebut memiliki mekanisme teknis operasional yang jelas. Seperti mekanisme bentuk sindikasi, penentuan bunga kredit, proporsi masing-masingnya, pemilihan nasabah serta agunan.

BPR sebagai lembaga perbankan dalam memberikan kredit harus memenuhi syarat-syarat kelayakan kredit berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme perbankan dan UU No 7 1992 tentang perbankan, diantaranya mengenai agunan. Sedangkan dalam UU No 25 1992 tentang koperasi, maka koperasi tidak dilarang untuk menentukan agunan. Sehingga mekanisme agunan dapat dilalui, berdasarkan kesepakatan berdua belah pihak. Penentuan bunga kredit harus didahului oleh peneliti teknis mengenai besarnya tingkat bunga demikian juga dengan proposi pendanaan. Umumnya koperasi menggunakan dana-dana kredit program atau pinjaman lunak berbunga rendah, sedangkan BPR biasanya menggunakan dana-dana komersial yang biasanya bunga lebih tinggi dari kredit koperasi. Untuk itu perlu ditentukan tingkat suku bunga kredit yang bisa diterima oleh kedua belah pihak.

4.3. Kerjasama Antara BPR

Kemungkinan bentuk kerja sama antara BPR adalah :

1. Dengan membentuk lembaga baru, dimana lembaga saham tersebut dimiliki oleh masing-masing BPR dengan komposisi berdasarkan kedua belah pihak
2. Tanpa membentuk lembaga baru, tetapi hanya merupakan mekanisme sindikasi pendanaan, interleding, yang telah untuk dilakukan dalam perbankan. Mekanisme ini juga termasuk menentukan tingkat suku bunga dan permasyarakatan kredit yang telah ditetapkan.

Kemungkinan pertama tidak dapat dilaksanakan, sebab BPR berdasarkan undang-undang no 7 1992 tentang perbankan pasal, PBR dilarang melakukan penyetaab modal. Yang berarti BPR tidak di-ijinkan mendirikan lembaga baru, dimana BPR menyertakan modalnya untuk mendirikan lembaga sesame BPR.

Alternative kedua lebih dimungkinkan karena tidak ada aturan yang melarang kerjasama tersebut memiliki mekanisme teknis operasional yang jelas. Seperti mekanisme berbentuk sindikasi, penentuan bunga kredit, proposi masing-masingnya, pemilihan nasabah serta agunan. Bentuk-bentuk kerjasama diatas telah dilakukan dan umum antar sesame bank.

Masalah likuiditas bagi sebagian besar bank perkreditan rakyat (BPR) masih menjadi kendala yang sulit dipecahkan. Salah satu alternative solusi yang pernah dicoba kelompok BPR di jabotabek adalah melalui pembentukan pool dan. Anggota BPR dalam kelompok menyediakan sadangan wajib dalam jumlah tertentu untuk "pool dana". Bagi yang membutuhkan likuiditas cepat, dapat mengejukan pinjaman jangka pendek kepada pool dana. Namun cara ini konon tidak menawarkan solusi yang efektif, karena BPR-BPR itu lebih banyak mengaharapkan fasilitas pinjaman ketimbang simpanan di pool dana itu.

4.4 kerjasama Antara KSP

Secara yeoritis, bahwa koperasi sebagai salah satu lembaga yang bertugas menyediakan dana (kredit) berpotensi dan menungkinkan untuk mengadakan kerjasama dengan sesame koperasi.

Berdasarkan prinsip dan tujuan usaha maka sisi positif pengembangan ke depan adalah dimungkinkan terjadinya proses sinergi kerjasama antara lembaga koperasi simpan-pinjam. Dari aspek legal koperasi pun diperbolehkan membentuk koperasi sekunder tingkat daerah maupun tingkat pusat.

Kemungkinan bentuk kerjasama adalah :

1. Dengan membentuk lembaga baru, dimana saham lembaga tersebut dimiliki oleh koperasi. Mwnurut UU koperasi No 25 Tahun 1992, koperasi primer bersama-sama dapat membentuk koperasi sekunder
2. Tanpa memebentuk lembaga baru, tetapi haya merupakan mekanisme sindikasi pandangan dengan menentukan tingkat suku bunga dan persyaratan kredit yang telah ditetapkan.

Kemungkinan pertama dapat dilaksanakan, sebab koperasi diperolehkan untuk membentuk koperasi sekunder tingkat daerah maupun smpai ketinggian nasional. Yang berarti koperasi dapat di-ijinkan mendirikan lembaga baru, dimana pada saat inipun mekanisme seperti ini telah dijalankan dan memang harus dijalankan untuk memperkuat koperasi itu sendiri.

Alternatif kedua dimungkinkan juga karena koperasi tidak ada aturan yang melarang kerjasama seperti tersebut. Artinya boleh dilakukan, asalkan kerjasama terssebut memiliki mekanisme teknik operasional yang jelas. Seperti mekanisme bentuk sindikasi, penentuan bungan kredit, proposi masing-masingnya, pemilihan nasabah serta agunan.

Koperasi dalam UU No 25/1992, tidak dilarang untuk menentukan agunan. Sehingga mekanisme agunan dapat dilalui, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penentuan bunga kredit harus didahului oleh teknis mengenai besarnya tingkat bunga demikian juga dengan proporsi pendanaan. Umumnya koperasi menggunakan dana-dana kredit program atau pinjaman lunak berbunga rendah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Penegmbangan jaringan kerjasama pendanaan BPR-BPR tingkat kecamatan untuk menjadi BPR tingkat kabupaten dapat dilakukan jika BPR yang baru tersebut hanya bisa dibuat melalui mekanisme “marger”, sedangkan melalui system pertanyaan modal tidak bisa, karna UU 7/1992 tidak memperkenankan BPR melakukan pertanyaan modal.

Kerjasama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk manjadi KSP sekunder kemungkinan, meningkat UU 25/1992 mendorong system tersebut. Namun demikian harus dirancang mekanisme organisasinya. Selian itu KSP mempunyai keterbatasan dibandingkan BPR, yakni KSP tidak diperkenankan mempunyai nasabah di luar anggotanya. Jika sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia maka KSP sekender ini dapat menjadi koperasi BPR.

5.2. Rekomendasi

Untuk menyiapkan suatu sistem jaringan perlu dilakukan :

1. Potensi konsumsi dan tabungan masyarakat
2. Potensi perkembangan ekomoni suatu wilayah
3. Peningkatan kapasitas JUKWIL/DA sebagai fasilitator terciptanya sebuah jaringan
4. Pendekatan lembaga pemerintah daerah, meningkat jaringan LKDP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan) dibawah PEMDA sangat potensial dimanfaatkan.